

Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)

DOI: <https://doi.org/10.35870/jtik.v10i1.4714>

Wacana Kebijakan Pengampunan Koruptor dalam Bingkai Media Online Tempo.co dan Metrotvnews.com Periode 19-31 Desember 2024

Mahisa Gesty Anggasani ^{1*}, Hanna Nurhaqiqi ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

article info

Article history:

Received 30 June 2025

Received in revised form

20 July 2025

Accepted 10 September 2025

Available online January 2026.

Keywords:

Framing Analysis; Discourse on Amnesty of Corruptors; Prabowo Subianto
Mediaindonesia.com.

abstract

As the country's top leader, it is common that Prabowo has become a central figure in the public eye. Recently, one of Prabowo's statements has sparked public discussion and is considered controversial. The statement in question is his expression of willingness to forgive corruptors, provided they return the stolen assets. Many people have linked the discourse with the image of fake heroism that has been associated with Prabowo since the beginning of his presidency. The construction of this image is influenced, in part, by the role of the media. Tempo.co and Metrotvnews.com are among the online news portals that reported on the discourse surrounding the amnesty policy for corruptors. This research employs Robert N. Entman's framing analysis model to examine how Tempo.co and Metrotvnews.com frame the discourse. The research object selected consisted of news articles on the discourse of an amnesty policy for corruptors, published between 19 and 31 December 2024 with 6 articles from Tempo.co and 5 articles of Metrotvnews.com. Tempo.co tends to criticize Prabowo's statement and does not support the realization of the proposed policy of granting clemency corruptors. Meanwhile Metrotvnews.com presents the policy discourse more favorably, portraying it as an effective approach to recovering state assets.

back

Sebagai orang nomor satu di Indonesia, tidak heran bila dirinya menjadi pusat perhatian masyarakat. Beberapa waktu terakhir, pernyataan Prabowo sempat menjadi topik diskusi masyarakat dan dinilai kontroversial. Pernyataan yang dimaksud adalah ungkapannya yang ingin memaafkan koruptor asalkan mereka mengembalikan hasil curiannya. Bahkan, banyak yang mengaitkan wacana kebijakan tersebut dengan citra fake hero yang telah melekat pada diri Prabowo sejak awal menjabat sebagai Presiden Indonesia. Terbentuknya citra tersebut merupakan sebagian dari peran media. Tempo.co dan Metrotvnews.com merupakan portal berita online yang turut memberitakan wacana kebijakan pengampunan koruptor. Oleh karena itu, dilakukan analisis framing dengan model Robert N. Entman untuk mengetahui bagaimana Tempo.co dan Metrotvnews.com membingkai wacana kebijakan pengampunan koruptor. Objek penelitian yang dipilih adalah berita wacana kebijakan pengampunan koruptor pada periode waktu 19-31 Desember 2024 dengan 6 berita dari Tempo.co dan 5 berita dari Metrotvnews.com. Tempo.co cenderung mengkritisi pernyataan Prabowo dan tidak mendukung terealisasinya wacana kebijakan pengampunan koruptor, sedangkan Metrotvnews.com mendukung wacana kebijakan tersebut karena efektif dalam mengembalikan aset negara.

Corresponding Author. Email: mahisagesty25@gmail.com ^{1}.

Copyright 2026 by the authors of this article. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

1. Pendahuluan

Prabowo Subianto merupakan orang nomor satu di Indonesia. Oleh karena itu, segala hal yang Prabowo lakukan cenderung menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia, termasuk pernyataan yang ia canangkan, kebijakan yang ia pilih dalam mengatasi permasalahan masyarakat, gaya kepemimpinan, hingga kehidupan pribadinya. Beberapa waktu terakhir, pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor sempat menjadi perdebatan di kalangan masyarakat umum maupun internal Pemerintah. Menurut Muessig (2020), sesuatu yang dengan mudah diterima dan ditolak oleh seseorang maupun kelompok masyarakat dapat dikategorikan sebagai *kontroversi*. Prabowo mencanangkan wacana kebijakan pengampunan koruptor saat berpidato di depan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pada Rabu, 18 Desember 2024 (CNN Indonesia, 2024). Secara rinci, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya ingin memaafkan koruptor asalkan mereka mengembalikan dana hasil curiannya. Tidak hanya itu, Prabowo juga menjanjikan proses tersebut dapat dilakukan secara diam-diam. Pernyataan tersebutlah yang kemudian menjadi topik diskusi masyarakat dan dinilai *kontroversial*. Lebih spesifik, kata kunci “Prabowo Maafkan Koruptor” mendapatkan puncak pencarinya di Google Trends pada tanggal 22 hingga 28 Desember 2024.

Setelah menjadi sorotan publik, Prabowo membuat klarifikasi yang menekankan bahwa pengampunan koruptor tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Para koruptor diwajibkan untuk mengembalikan dana hasil curian mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Menurut Prabowo, kebijakan pengampunan koruptor dapat menjadi wadah pertobatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut terlontar dari mulut Prabowo melalui pidatonya pada acara Puncak Perayaan Natal Nasional 2024, 28 Desember 2024 (Gayati & Firdaus, 2024). Seiring dengan klarifikasi Prabowo, wacana kebijakan pengampunan koruptor semakin mendapatkan respons yang beragam. Respons tersebut tidak terbatas dari masyarakat secara umum, namun juga internal Pemerintah Indonesia periode 2024-2029, meliputi badan eksekutif dan legislatif.

Salah satunya yaitu anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nasyirul Falah Amru yang menilai wacana kebijakan pengampunan koruptor masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Ia berpendapat, wacana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan asas negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Menurutnya, Pemerintah wajib memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi (Sulistya, 2024). Tanggapan tersebut berbanding terbalik dengan tanggapan yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, kebijakan pengampunan koruptor dapat diimplementasikan melalui *amnesti* dan *abolisi*. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi “Presiden memberi *amnesti* dan *abolisi* dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1945 tentang *Amnesti* dan *Abolisi* (Iswanto & Jeumpa, 2018). *Amnesti* merupakan penghapusan hukuman bagi terdakwa tindak pidana, sedangkan *abolisi* berarti peniadaan tuntutan pidana (Hidayah & Riauan, 2021). Meskipun wacana kebijakan pengampunan koruptor mendapat dukungan dari internal Pemerintah, kritikan dari masyarakat umum tidak berhenti berdatangan. Masyarakat turut mengaitkan wacana kebijakan tersebut dengan citra *fake hero* yang telah melekat pada diri Prabowo sejak awal menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Fake heroism merupakan salah satu konsep yang sering diterapkan dalam dunia politik. Dilansir dari pemberitaan Tempo.co, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Alfath Bagus menilai kebijakan pengampunan koruptor sebagai kebijakan yang menerapkan konsep kepahlawanan palsu karena bersifat *kontroversial* dan cenderung memaksa publik untuk percaya padanya (Bagus, 2025). Alfath berpendapat, kebijakan pengampunan koruptor tidak dapat menjangkau pemain utama dari kasus korupsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut berbanding terbalik dengan salah satu janji kampanye Prabowo yaitu pemberantasan korupsi. Selain itu, wacana kebijakan pengampunan koruptor juga dianggap ingkar dari pernyataannya sebelumnya yang

sebut ingin mengejar koruptor hingga Antartika. Citra *fake hero* terkait wacana kebijakan pengampunan koruptor yang melekat pada diri Prabowo adalah hasil dari peran media melalui pemberitaannya, baik itu media formal maupun media sosial. Media formal yang dimaksud meliputi media elektronik, media cetak, dan media online melalui portal berita online mereka. Berita merupakan salah satu faktor dari lahirnya realitas sosial di masyarakat melalui proses konstruksi. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) menerangkan bahwa realitas sosial adalah hasil dari konstruksi yang manusia lakukan melalui proses eksternalisasi, objektivasi, serta internalisasi.

Dalam konteks jurnalistik, proses konstruksi wajib melalui beberapa tahapan meliputi investigasi, verifikasi yang berlapis, serta penyajian narasi yang menarik dengan mengedepankan prinsip objektivitas. Proses konstruksi realitas sosial pada pemberitaan biasa dikenal dengan istilah *framing* pemberitaan. *Framing* pemberitaan dapat membentuk opini publik terkait suatu isu maupun fenomena (Kurniawan & Muktiyo, 2019). Dengan kata lain, *framing* pemberitaan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dalam memaknai isi pemberitaan. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis *framing* untuk mengetahui bagaimana media online di Indonesia melalui portal berita online mereka dalam membungkai suatu isu maupun fenomena. Terlebih, setiap media memiliki dasar *framing* nya sendiri. Biasanya, *framing* pemberitaan dibentuk berdasarkan pada ideologi dan visi misi dari perusahaan media. Termasuk pada pemberitaan terkait wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan paradigma konstruktivisme yang melihat realitas sosial sebagai hasil dari konstruksi dan bukan sepenuhnya fakta yang terjadi di lapangan (McQuail & Deuze, 2020). Hal tersebut sejalan dengan tujuan penelitian ini yang ingin mengetahui bagaimana media membungkai suatu isu atau fenomena dalam pemberitaan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif agar dapat menjabarkan pemahaman secara menyeluruh

dan mendalam tanpa berfokus pada pengukuran dan pemisahan di bagian-bagian tertentu (Mustika, 2017). Dengan demikian, data yang dihasilkan akan bersifat *komprehensif*, serta melahirkan pemahaman yang rinci terkait pemberitaan mengenai pernyataan Prabowo yang ingin mengampuni koruptor. Objek dari penelitian ini adalah pemberitaan mengenai wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo pada portal berita online Tempo.co dan Metrotvnews.com. Lebih spesifik, penelitian dengan judul “Wacana Kebijakan Pengampunan Koruptor dalam Bingkai Media Online Tempo.co dan Metrotvnews.com” ini berfokus pada pemberitaan di periode waktu 19 sampai 31 Desember 2024, kemudian disaring kembali menggunakan kata kunci “Prabowo maafkan koruptor” yang menghasilkan 45 berita dari Tempo.co dan 16 berita dari Metrotvnews.com. Hasil penyaringan pertama kemudian disaring kembali berdasarkan beberapa topik pemberitaan meliputi, pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor, tanggapan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, tanggapan pakar, serta klarifikasi Prabowo terhadap pernyataannya yang dinilai *kontroversial*. Penyaringan kedua menghasilkan 6 berita dari Tempo.co dan 5 berita dari Metrotvnews.com yang kemudian dianalisis menggunakan *analisis framing* model Robert N. Entman.

Analisis framing dilakukan untuk mengetahui bagaimana perspektif dari perusahaan media terkait wacana kebijakan pengampunan koruptor berdasarkan pemberitaan yang mereka susun. Secara rinci, penelitian ini melalui beberapa tahapan analisis sebagai berikut; *define problems* (menentukan masalah) yang dilakukan untuk melihat bagaimana Tempo.co dan Metrotvnews.com mendefinisikan pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor, *diagnose causes* (menentukan penyebab) untuk mengetahui siapa pemeran utama dari wacana kebijakan pengampunan koruptor, *make moral judgement* (membuat penilaian moral) untuk menganalisis arah argumentasi moral yang dibangun oleh Tempo.co dan Metrotvnews.com, serta *treatment recommendation* (menyarankan solusi) untuk melihat solusi yang Tempo.co dan Metrotvnews.com tawarkan terkait wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dinilai *kontroversial* oleh publik. Analisis tersebut juga

dikaitkan dengan teori konstruksi realitas sosial untuk mengetahui apakah pemberitaan mengenai wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo turut membangun realitas sosial tertentu di masyarakat secara umum.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Framing Berita dengan Topik “Pernyataan Prabowo Maafkan Koruptor”

Pada topik ini, Tempo.co mempublikasi berita dengan judul “Prabowo Buka Ruang Bagi Koruptor Kembalikan Hasil Curian Tanpa Ketahuan,” sedangkan Metrotvnews.com menarasikannya melalui judul “Prabowo: Hei Koruptor! Kalau Kembalikan yang Kau Curi, Mungkin Kita Maafkan.” Berdasarkan hasil *analysis framing* dengan model Robert N. Entman, ditemukan bahwa dua portal berita online tersebut mendefinisikan pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor secara tersurat melalui headline dan lead pemberitaan mereka. Namun, Metrotvnews.com cenderung lebih rinci dalam mendefinisikan pernyataan Prabowo. Metrotvnews.com turut menjabarkan pernyataan Prabowo pada pertengahan teks berita mereka. Berbanding terbalik dengan cara mereka mendefinisikan pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor, Tempo.co dan Metrotvnews.com menarasikan penyebab dari wacana kebijakan tersebut secara tersirat. Tempo.co menjabarkan elemen *diagnose causes* mereka melalui keseluruhan teks berita.

Hal tersebut berbeda dengan Metrotvnews.com yang tidak menarasikan penyebab dari wacana kebijakan pengampunan koruptor pada teks berita. Metrotvnews.com cenderung berfokus pada kronologi pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor. *Diagnose causes* yang Tempo.co dan Metrotvnews.com bangun, turut mempengaruhi argumentasi moral mereka terkait pernyataan Prabowo yang ingin mengampuni koruptor. Tempo.co membangun argumentasi moral mereka melalui topik sampingan, yaitu pernyataan Prabowo yang mengimbau agar para pihak pengguna fasilitas negara dapat segera membayar kewajiban pajak mereka. Tempo.co menyertakan pernyataan tersebut

seolah-olah untuk menciptakan narasi kontradiktif terkait pernyataan yang Prabowo buat dalam satu waktu yang sama. Hal tersebut bertolak belakang dengan argumentasi moral yang Metrotvnews.com bangun. Metrotvnews.com cenderung membangun narasi yang positif terkait pernyataan Prabowo yang ingin mengampuni koruptor tanpa benar-benar menyertakan sudut pandang jurnalis sebagai penulis berita. Argumentasi moral di atas turut mempengaruhi solusi yang Tempo.co dan Metrotvnews.com tawarkan mengenai pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor. Tempo.co menarasikan elemen ini menggunakan kutipan Prabowo yang yakin bahwa masyarakat akan selalu mendukung dan berada di pihaknya. Penyertaan kutipan tersebut memperkuat arah *framing* dari Tempo.co yang cenderung kontra karena memilih kutipan yang saling kontradiktif satu sama lain. Begitu pula dengan Metrotvnews.com yang konsisten menarasikan teks berita mereka dengan positif. Metrotvnews.com menggambarkan elemen ini melalui kutipan dari Prabowo sebagai bentuk dukungannya kepada wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo.

Framing Berita dengan Topik “Tanggapan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra”

Pada topik ini, peneliti memilih satu berita dari Tempo.co dan dua berita dari Metrotvnews.com yang memiliki arah *framing* paling kuat. Berita yang dimaksud antara lain, “Soal Pengampunan Koruptor, Yusril: Pidana Baru Tak Melulu Efek Jera” dan “Yusril Sebut Pernyataan Presiden Prabowo soal Maafkan Koruptor Sejalan dengan UNCAC” dari Metrotvnews.com, serta “Menko Yusril Jelaskan Maksud Presiden Prabowo Maafkan Koruptor: Tak Ada yang Salah Jika...” dari Tempo.co. Berdasarkan tiga berita tersebut, ditemukan bahwa Tempo.co dan Metrotvnews.com mendefinisikan tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan pendekatan yang berbeda pada setiap beritanya. Tempo.co menggambarkan elemen ini melalui isi teks berita, sedangkan Metrotvnews.com menarasikan bagian *define problems* pada dua berita mereka melalui headline dan lead pemberitaan. Namun, pada berita kedua, Metrotvnews.com turut mendefinisikan tanggapan dari Yusril melalui paragraf dua teks berita.

Meskipun mendefinisikan tanggapan Yusril terkait wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo dengan gamblang, Metrotvnews.com tidak menarasikan penyebab dari tanggapan tersebut secara tersurat pada berita kedua mereka yang berjudul "Yusril Sebut Pernyataan Presiden Prabowo soal Maafkan Koruptor Sejalan dengan UNCAC". Metrotvnews.com cenderung meleburkan elemen *diagnose causes* berita tersebut melalui keseluruhan teks berita. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada berita mereka yang berjudul "Soal Pengampunan Koruptor, Yusril: Pidana Baru Tak Melulu Efek Jera." Metrotvnews.com secara gamblang menarasikan penyebab dari tanggapan Yusril melalui teks berita. Begitu pula dengan Tempo.co yang menarasikan penyebab dari topik ini secara detail pada beberapa paragraf dalam teks berita. Tempo.co dan Metrotvnews.com memiliki argumentasi moral yang berbeda terkait tanggapan Menteri Yusril mengenai wacana kebijakan pengampunan koruptor yang Prabowo canangkan sebelumnya. Tempo.co menarasikan elemen ini melalui kutipan dari Yusril yang menyebut bahwa wacana kebijakan pengampunan koruptor lebih menekankan pada *asset recovery* negara dan bukan efek jera.

Penyertaan kutipan tersebut turut menggambarkan arah *framing* dari Tempo.co yang cenderung bertujuan untuk membangun diskusi publik. Terlebih, sebelumnya masyarakat sempat memberikan respons yang negatif terkait wacana kebijakan pengampunan koruptor. Argumentasi moral yang Tempo.co bangun, berbanding terbalik dengan milik Metrotvnews.com. Metrotvnews.com tetap konsisten menarasikan argumentasi moral mereka mengenai wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo dengan positif. Hal tersebut tergambar melalui kutipan dari Yusril yang mendukung terealisasinya wacana kebijakan tersebut tanpa menyertakan sudut pandang media melalui jurnalis sebagai penulis berita. Masih seiras dengan argumentasi yang berusaha mereka bangun, Metrotvnews.com terang-terangan menunjukkan arah *framing* mereka yang setuju bila Pemerintah merealisasikan kebijakan pengampunan koruptor demi *asset recovery* negara. Hal tersebut berbeda dengan Tempo.co yang menerapkan makna ganda pada solusi yang mereka tawarkan terkait topik ini.

Tempo.co seakan-akan setuju dengan wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo sebelumnya melalui penyertaan kutipan dari Yusril. Di lain sisi, kutipan tersebut juga cenderung menggiring opini publik karena Yusril dinilai mendukung pelemahan dari keadilan dan hukum yang ada di Indonesia.

Framing Berita dengan Topik "Tanggapan Pakar"

Sama halnya dengan topik ketiga, pada topik ini, peneliti turut memilih tiga berita dari Tempo.co dan Metrotvnews.com. Secara rinci, berita tersebut meliputi "Soal Wacana Prabowo Maafkan Koruptor, IM57+ Institute: Kepentingan Segelintir Elite," "Prabowo Subianto Mau Maafkan Koruptor, ICW: Harusnya Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset" dari Tempo.co, dan "Eks Ketua KPK Sebut Ide Pengampunan Koruptor Butuh Ubah Undang-Undang" yang merupakan berita milik Metrotvnews.com. Tempo.co dan Metrotvnews.com mendefinisikan topik "Tanggapan pakar" ini dengan berbeda. Tempo.co memilih pakar yang cenderung menyoroti kekurangan dari wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo, sedangkan Metrotvnews.com menyertakan tanggapan dari pakar yang setuju bila Pemerintah merealisasikan kebijakan tersebut.

Lebih spesifik, Tempo.co menarasikan tanggapan dari Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito dan peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengenai wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo sebelumnya. Menurut Lakso, kebijakan pengampunan koruptor merupakan kepentingan dari segelintir elit. Seiras dengan pendapat Lakso, Egi menyebut bahwa Prabowo seharusnya mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, bukan malah membuat kebijakan yang *kontroversial*. Berbanding terbalik, Metrotvnews.com menyertakan tanggapan dari Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango yang menilai wacana kebijakan pengampunan koruptor sebagai interpretasi dari pengaturan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang berfokus pada *asset recovery* negara. Melalui isi beritanya, Tempo.co dan Metrotvnews.com menggambarkan argumentasi

moral mereka secara tersurat. Tempo.co terang-terangan menunjukkan bingkai pemberitaan mereka yang mengarah pada ketidaksetujuan terhadap wacana kebijakan pengampunan koruptor. Hal tersebut tergambar melalui pemilihan kutipan dari narasumber yang tidak mendukung terealisasinya wacana kebijakan pengampunan koruptor. Berbanding terbalik, Metrotvnews.com lebih menyoroti sisi positif dari wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dinilai sesuai dengan pengaturan *UNCAC*. Meskipun demikian, Metrotvnews.com turut menyertakan saran dari Nawawi yang mengatakan bahwa penerapan kebijakan pengampunan koruptor harus dibersamai dengan penggantian instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tepatnya pada pasal 4. Berbeda dengan pendapat Nawawi yang mengamini adanya interpretasi pengaturan *UNCAC* pada wacana kebijakan pengampunan koruptor, Tempo.co menyoroti pendapat Lakso yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak menerapkan pengaturan *UNCAC* secara menyeluruh. Menurut Lakso, Pemerintah seharusnya menginterpretasikan pengaturan *UNCAC* secara menyeluruh, termasuk pada instrumen perampasan harta kekayaan yang tidak sah. Mesih konsisten dengan arah *framing*-nya yang kontra terhadap wacana kebijakan pengampunan koruptor, pada berita kedua mereka, Tempo.co menyoroti pernyataan Egi yang meminta agar Pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset, bukan membuat wacana kebijakan yang tumpang tindih dan merugikan masyarakat.

Framing Berita dengan Topik “Klarifikasi Prabowo terhadap Pernyataannya yang Dinilai Kontroversial”

Tempo.co dan Metrotvnews.com menarasikan topik ini melalui berita dengan judul “Prabowo Klarifikasi Pernyataan soal Beri Pengampunan Koruptor” dan “Bantah Maafkan Koruptor, Prabowo: Hanya Beri Ruang untuk Bertaubat.” Dua portal berita online tersebut mendefinisikan topik ini secara gamblang pada headline pemberitaan mereka. Bahkan, Metrotvnews.com turut menarasikannya elemen *define problems* berita mereka pada paragraf dua dalam teks berita. Hal tersebut berbeda dengan Tempo.co yang hanya memanfaatkan headline pemberitaan untuk mendefinisikan topik berita ini.

Masih berhubungan dengan cara mereka mendefinisikan topik ini, Tempo.co dan Metrotvnews.com memiliki cara yang berbeda dalam menggambarkan penyebab dari klarifikasi yang dilakukan oleh Prabowo. Tempo.co menjabarkan penyebab klarifikasi Prabowo secara kronologis. Selain itu, Tempo.co juga menyertakan kutipan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra untuk memperdalam alasan Prabowo melakukan klarifikasi. Berbeda dengan Tempo.co, Metrotvnews.com hanya memanfaatkan lead pemberitaan untuk menarasikan elemen *diagnose causes* berita mereka. Meskipun demikian, Metrotvnews.com tetap menjabarkan penyebab klarifikasi Prabowo secara rinci. Metrotvnews.com secara konsisten memberikan argumentasi moral yang positif terkait wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo. Begitu pula pada berita dengan topik ini, Metrotvnews.com menggambarkan argumentasi mereka melalui kutipan dari Prabowo yang menginginkan agar kebijakan pengampunan koruptor dapat menjadi wadah pertobatan bagi para koruptor.

Meskipun demikian, Metrotvnews.com turut menyoroti tujuan utama dari wacana kebijakan tersebut yaitu *asset recovery* negara. Berbeda dengan Metrotvnews.com yang tegas terhadap arah *framing* mereka, Tempo.co cenderung lebih kritis dan membagi argumentasi mereka menjadi dua sisi. Pertama, Tempo.co mendukung opini Prabowo terkait pertobatan sebagai jalan yang baik dalam segi moral. Namun, Tempo.co turut menyertakan kutipan yang menggambarkan bahwa kebijakan pengampunan koruptor bukanlah solusi yang efektif untuk diterapkan di Indonesia yang notabene adalah negara hukum. Tempo.co dan Metrotvnews.com membangun puncak *framing* mereka menggunakan solusi yang mereka tawarkan. Tempo.co menggambarkan arah *framing* mereka secara tersirat melalui kutipan dari Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. yang menyebut bahwa hukum di Indonesia tidak membenarkan adanya pengampunan bagi para koruptor. Bertolak belakang, Metrotvnews.com membungkai pemberitaan mereka pada topik ini menggunakan narasi yang positif. Lebih jelas, Metrotvnews.com menyertakan kutipan langsung dan tidak langsung dari Prabowo untuk menggambarkan

framing yang mereka bangun. Pada kutipan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya ingin rakyat bersatu dan mendukung terealisasinya wacana kebijakan pengampunan koruptor.

Perbandingan *Framing* Tempo.co dan Metrotvnews.com

Tempo.co cenderung membingkai pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor dengan kritis. Maksudnya, Tempo.co menyoroti wacana kebijakan pengampunan koruptor secara menyeluruh, baik itu keuntungan maupun kerugian dari wacana kebijakan tersebut. Tempo.co menggambarkan *framing* beritanya melalui pemilihan narasumber, proses seleksi isu pada penulisan berita, serta penonjolan aspek tertentu pada proses penyusunan teks berita. Lebih spesifik, Tempo.co membingkai pemberitaan mereka mengarah pada ketidaksetujuan terhadap wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo. Tempo.co menggambarkan *framing* tersebut dengan menggunakan dixi yang frontal dalam menyusun teks berita. Berbeda dengan Tempo.co yang menaraskan beritanya secara kritis, Metrotvnews.com lebih menonjolkan aspek kronologis dalam membingkai wacana kebijakan pengampunan koruptor. Metrotvnews.com tidak benar-benar menyertakan sudut pandang kritis mereka sebagai perusahaan media. Portal berita online milik Surya Paloh tersebut, cenderung membangun narasi yang positif terkait pernyataan Prabowo yang sebut ingin memaafkan koruptor.

Narasi yang dibangun, turut menghasilkan efek mobilisasi massa yang mendukung terealisasinya kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo sebelumnya. Perbedaan *framing* berita dari Tempo.co dan Metrotvnews.com mengenai wacana kebijakan pengampunan koruptor, disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling menonjol adalah perbedaan kepemilikan dari dua portal berita online tersebut. Tempo.co merupakan portal berita online milik beberapa mantan jurnalis Indonesia yang terkenal kritis dalam memberitakan suatu isu atau fenomena. Jurnalis yang dimaksud meliputi Usamah, Harjoko Trisnadi, Goenawan Mohamad, Lukman Setiawan, Fikri Jufri, serta Christiano Wibisono. Berbeda dengan pemilik Tempo.co yang tidak terlibat dalam dinamika politik

Indonesia, pemilik Metrotvnews.com, Surya Paloh, merupakan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pada pemilu 2024, Partai NasDem sempat tergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun tidak secara resmi tergabung dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Perbedaan kepemilikan tersebut turut mempengaruhi ideologi dan kepentingan dari perusahaan media dalam mengonstruksi wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo sebelumnya. Menurut McQuail (2020), media modern tidak lagi bersifat netral, namun cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik ekonomi, bukan masyarakat secara umum.

Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana media membingkai wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto melalui analisis *framing* yang diterapkan pada dua portal berita online, yaitu Tempo.co dan Metrotvnews.com. Tempo.co cenderung membingkai kebijakan ini secara kritis, dengan menyoroti dampak negatif dan kontroversi yang muncul, serta mempertanyakan kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini tercermin dalam penggunaan dixi yang lebih frontal dan penekanan pada potensi ketidaksetujuan publik terhadap kebijakan tersebut. Di sisi lain, Metrotvnews.com lebih memilih untuk membingkai kebijakan pengampunan koruptor secara positif, dengan menyoroti manfaatnya dalam pemulihan aset negara dan menekankan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan tujuan internasional dalam *asset recovery* melalui pengaturan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) (Kurniawan & Muktiyo, 2019).

Perbedaan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofian dan Lestari (2021) dalam analisis *framing* pemberitaan terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Mereka menemukan bahwa media seperti Koran,tempo.co cenderung membingkai isu dengan skeptisme terhadap pemerintah, menggambarkan kebijakan yang tidak konsisten dan kurang efektif. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, di mana Tempo.co menunjukkan kecenderungan untuk mengkritisi kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah, sementara Metrotvnews.com lebih condong pada

pembingkai positif yang mendukung kebijakan tersebut. Penelitian ini juga menggarisbawahi bagaimana perbedaan kepemilikan media mempengaruhi framing yang dibangun, di mana Tempo.co, yang dimiliki oleh jurnalis independen, lebih bebas dalam memberikan kritik, sementara Metrotvnews.com, yang dimiliki oleh Surya Paloh, memiliki afiliasi dengan Partai NasDem dan cenderung memberikan narasi yang lebih mendukung kebijakan pemerintah.

Perbedaan framing ini juga sejalan dengan penelitian McQuail dan Deuze (2020), yang menjelaskan bahwa media modern tidak lagi bersifat netral dan sering kali melayani kepentingan politik atau ekonomi tertentu, bukan kepentingan publik. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan dalam framing antara kedua media menunjukkan bagaimana media dapat dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan pemiliknya. Tempo.co, sebagai media yang lebih kritis, menggunakan framing yang lebih berfokus pada kritikan terhadap kebijakan, sedangkan Metrotvnews.com, yang lebih mendukung pemerintahan Prabowo, menggunakan framing yang lebih positif dan mendukung kebijakan tersebut sebagai langkah yang tepat untuk pemulihan negara. Temuan ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana media dapat membentuk opini publik melalui framing, seiring dengan dinamika politik dan ideologi yang ada dalam media tersebut.

4. Kesimpulan dan Saran

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Tempo.co dan Metrotvnews.com membungkai pemberitaan mereka terkait dengan wacana kebijakan pengampunan koruptor yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Kedua portal berita ini, meskipun sama-sama beroperasi di Indonesia, memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Tempo.co merupakan media yang dimiliki oleh sekelompok jurnalis independen yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah, sementara Metrotvnews.com adalah media yang dimiliki oleh Surya Paloh, yang memiliki kedekatan dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun tidak secara resmi tergabung dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Perbedaan ini tercermin dalam

framing yang mereka bangun terhadap kebijakan pengampunan koruptor. Tempo.co cenderung mengkritisi kebijakan tersebut dan menampilkan ketidaksetujuannya terhadap realisasi kebijakan itu, sedangkan Metrotvnews.com lebih memilih untuk menyajikan kebijakan tersebut dengan cara yang lebih mendukung dan positif, berfokus pada pemulihan asset negara dan solusi praktis. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian McQuail dan Deuze (2020), yang menyatakan bahwa media tidak lagi netral, melainkan cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Tempo.co, yang lebih kritis dan independen, menyajikan pemberitaan dengan cara yang lebih berani dan berfokus pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan Metrotvnews.com, yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pemerintah, menyajikan pemberitaan yang lebih mendukung. Hal ini mencerminkan bagaimana kepemilikan dan ideologi media dapat memengaruhi framing terhadap suatu isu atau kebijakan, seperti yang juga ditemukan oleh Sofian dan Lestari (2021) dalam studi mereka tentang *framing* kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Mereka menemukan bahwa media yang lebih kritis cenderung menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah, sementara media yang mendukung pemerintahan menggambarkan kebijakan tersebut dengan lebih positif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Tempo.co dan Metrotvnews.com tentang pentingnya mempertimbangkan dampak dari pemberitaan yang mereka sajikan kepada publik. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan membangun kesadaran sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi media untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip objektivitas dan independensi dalam pemberitaan mereka, meskipun mereka memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda. Sejalan dengan hal ini, peneliti menyarankan agar portal berita online di Indonesia, termasuk Tempo.co dan Metrotvnews.com, selalu berpegang pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang dapat membantu mereka menghasilkan berita yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana media, sebagai agen konstruksi realitas sosial, dapat lebih bijak dalam memilih framing yang tidak hanya

menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan publik secara keseluruhan.

5. Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2021). Framing Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pada Media Tirto Id Dan Republika Co Id. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 138-149.
<https://doi.org/10.14710/interaksi.10.2.138-149>.
- Alrizki, D., & Aslinda, C. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Tidak Lockdown di kompas. com dan detik. com. *Journal of Political Communication and Media*, 1(01), 24-36.
- Ester, P. P. (2024). ANALISIS FRAMING BERITA KEMUNDURAN DEMOKRASI AKHIR PEMERINTAHAN JOKOWI PADA MEDIA ONLINE KOMPAS. ID DAN CNN INDONESIA (Doctoral dissertation, UPN "Veteran" Jawa Timur).
- Haerul, Z. A. (2024). *Framing Penulisan Berita Pendidikan pada Media Online Tuturkata* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Hartono, Y., & Huda, K. (2020). Sejarah Kontroversial G 30 S/PKI Konstruksi Materi dan Praksis Pembelajaran.
- Hidayah, S. M. (2022). *Analisis Framing Isu Kebijakan Pemerintah Tentang Rencana Pembelajaran Tatap Muka Juli 2021 Di Media Online CNN Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tentang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. *Medium*, 9(2), 167-184.
[https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9\(2\).8519](https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(2).8519).
- Iswanto, H., & Jeumpa, I. K. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar. *Dalam Jurnal Bidang Hukum Pidana*, 2(1).
- Kurniawan, D., & Muktiyo, W. (2019). Framing berita presiden Donald Trump oleh media asing dan media nasional. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(03), 17-23.
- McQuail, D., & Deuze, M. (2020). McQuail's media and mass communication theory.
- Mustika, R. (2017). Analisis framing pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2).
<https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.159>.
- Rochmah, H. A. (2024). *Analisis framing perbandingan pemberitaan Pondok Pesantren Al Zaytun pada media online Detik. com dan Kompas. com* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Sofian, A., & Lestarini, N. (2021). Analisis framing pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 (Analisis framing model Robert N. Entman pada media online Koran. tempo. co Edisi Maret 2020). *Commicast*, 2(1), 58-70.
- Tahitu, A., Tutuhatunewa, A. R., & Sirait, J. P. M. (2021). Konstruksi Realitas Sosial Dalam Jurnalisme Investigasi: Analisis Naratif Laporan Mendalam Tempo. *Jurnal Badati*, 3(2), 142-159.